

## ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SISTEM PELAPORAN KEUANGAN DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA

Rizka Saptarinur

[rizkasaptarinur@gmail.com](mailto:rizkasaptarinur@gmail.com)

Siti Rofingatun

Rama Soyana Arung Lamba

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan, pengendalian akuntansi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BPMP Provinsi Papua baik secara simultan maupun parsial. Jenis penelitian ini ada deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terhimpun dalam tim SAKIP serta terlibat dalam proses keuangan, penyusunan draft kinerja program, anggaran, serta pelaporan dan evaluasi kinerja serta beberapa staf sebanyak 70 orang pegawai yang bekerja pada BPMP Papua. Penelitian ini termasuk penelitian survei dimana 70 sampel merupakan sampel jenuh dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya. Alat analisis menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS Versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel anggaran berbasis kinerja dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan variabel sistem pelaporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara simultan anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BPMP Provinsi Papua.

**Kata Kunci:** Anggaran Berbasis Kinerja; Sistem Pelaporan Keuangan; Pengendalian Akuntansi; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of performance-based budgeting, financial reporting systems, accounting controls, and performance accountability of government agencies on BPMP Papua Province either simultaneously or partially. This type of research is quantitative descriptive. The population in this study were all employees who were part of the SAKIP team and were involved in the financial process, preparing program performance drafts, budgets, and performance reporting and evaluation as well as several staff of 70 employees who worked at BPMP Papua. This research is a survey research where 70 samples are saturated samples and use a questionnaire as a data collection tool. The analysis tool used multiple regression analysis with the help of the SPSS Version 25 program. The results showed that partially performance-based budgeting and accounting control variables had a significant positive effect on government agency performance accountability, while the financial reporting system variable had no significant effect on government agency performance accountability. Simultaneously performance-based budgeting, financial reporting systems and accounting controls have a significant positive effect on government agency performance accountability at BPMP Papua Province.*

**Keywords:** Performance-Based Budgeting; Financial Reporting System; Accounting Controls; Accountability For The Performance Of Government Agencies

### 1. PENDAHULUAN

Penganggaran berbasis kinerja yang baik oleh instansi pemerintah dan pemantauan yang optimal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dan mengoptimalkan kinerja manajemen operasi pemerintah. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan direvisi kembali dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan

keuangan daerah. anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*) mengalokasikan sumber daya untuk program maupun unit organisasi menggunakan pengukuran kinerja sebagai indikator kinerja organisasi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada awal tahun 2021 melakukan revitalisasi (penggabungan) Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang berada di bawah jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah terhadap 34 Provinsi. Hasilnya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan BP-PAUD di merger menjadi satu UPT dan melakukan perubahan nama serta fungsi LPMP menjadi BPMP atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang merupakan UPT Kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang berada di Setiap Provinsi di Indonesia yang didapati telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan dengan sistem penganggaran berbasis kinerja.

Pencapaian (SK) Sasaran Kegiatan, yaitu Terwujudnya Tatakelola LPMP Papua Yang Baik dengan Nilai Minimal 80 pada tahun 2019, terealisasi 70,77, masuk dalam kategori BB dengan interpretasi yaitu sangat baik, akuntabel, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Ada beberapa hambatan terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada LPMP Provinsi papua, diantaranya: (1) Belum efektifnya kerja Tim SAKIP ditandai dengan masing-masing anggota belum mandiri dan sinergi, (2) Belum berjalan maksimalnya rapat evaluasi bulanan sebagai wadah menuju perbaikan, dan (3) Belum seluruh indikator penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP terpenuhi.

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah untuk menjelaskan keberhasilan dan kegagalannya dalam memenuhi misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem akuntabilitas yang teratur. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan keterbukaan kepada pemangku kepentingan dalam kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah

Sistem pelaporan mencerminkan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan kinerja semua kegiatan dan sumber daya yang harus dijelaskan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk dapat memantau dan mengontrol kinerja manajer dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau pekerjaan Pusat Pertanggungjawaban. Laporan harus menunjukkan hasil kerja instansi yang bertanggung jawab dan anggarannya sehingga anggaran dapat dilihat (Devika Diah, 2019).

Sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Pada BPMP Provinsi Papua terdapat tim SPI atau Satuan Pengawasan Internal yang berfungsi untuk mengendalikan transaksi keuangan dan menggunakan buku kas umum dalam mencatat transaksi keluar dan masuknya kas pada setiap kegiatan atau program kerja.

Fenomena yang terjadi saat ini Mengenai masalah akuntabilitas, di Indonesia terdapat beberapa masalah akuntabilitas kinerja, yaitu kinerja pegawai negeri sipil atau PNS sedang mendapat sorotan sebab penggunaan biaya pemerintah yang tinggi secara tidak tepat. Dalam mendorong akuntabilitas kinerja yang baik instansi pemerintah, BPMP Papua diminta untuk

terus mengupayakan peningkatan kinerjanya. Hal ini disebabkan kurangnya akuntabilitas kinerja BPMP Papua. Hal ini diyakini menjadi masalah yang sering terjadi selama ini, maka dari itu penulis berspekulasi bahwa hal tersebut terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya dari anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan dan pengendalian akuntansi yang belum berorientasi pada hasil akhir.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dengan cara membandingkan Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja, hasilnya LPMP Papua pada tahun 2019 dianggap belum Efisien (*Inefisiensi -10,25*) dalam Penggunaan Anggaran dikarenakan (1) Kelebihan belanja bahan dan akomodasi kegiatan disebabkan jumlah peserta kegiatan yang hadir lebih sedikit dibanding target, (2) Biaya perjalanan di Papua sering melebihi Standar Biaya Umum (SBU), dan (3) Struktur anggaran belum proporsional.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka penulis berkeinginan melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan judul penelitian Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini Menggunakan Pendekatan Deskriptif Kuantitatif dengan sumber data data primer. Lokasi Penelitian dilaksanakan di BPMP Provinsi Papua. Populasi dalam penelitian ini Adalah seluruh pegawai yang terhimpun dalam tim sakisip, serta terlibat dalam proses keuangan, penyusunan draft kinerja program, anggaran, serta pelaporan dan evaluasi kinerja serta beberapa staf sebanyak 70 orang pegawai yang bekerja pada BPMP Papua. Penelitian ini termasuk penelitian survei dimana 70 sampel merupakan sampel jenuh dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya, teknik dalam pemberian skor yangdigunakan adalah Teknik Skala Likert. Data Dianalisis menggunakan analisis regresi bergandadengan bantuan program SPSS Versi 25.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Analisis Statistik

Berdasarkan analisis statistik deskriptif berikut adalah hasil statistik deskriptif setiap variabel operasional.

**Tabel 1**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

| Descriptive Statistics |    |         |         |         |                |
|------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
|                        | N  | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
| Anggaran               | 64 | 22.00   | 55.00   | 45.1094 | 7.14058        |
| Pelaporan              | 64 | 10.00   | 25.00   | 19.5469 | 4.17829        |
| Pengendalian           | 64 | 10.00   | 25.00   | 20.4688 | 3.62079        |
| AK_Kinerja             | 64 | 17.00   | 40.00   | 33.8594 | 4.61835        |
| Valid N (listwise)     | 64 |         |         |         |                |

Sumber: Data diolah, 2022

Dari Tabel diatas diketahui bahwa variabel Anggaran terdapat 1 orang responden dengan perolehan nilai minimum dan Perolehan nilai maksimum dengan jumlah responden sebanyak 5 orang. Pada Variabel Pelaporan terdapat 4 orang responden dengan jawaban minimum dan 2 orang responden dengan nilai maksimum. variabel Pengendalian terdapat 2 orang responden dengan jawaban minimum dan 3 orang responden dengan nilai maksimum. dan Variabel Akuntabilitas terdapat 1 orang responden dengan jawaban minimum dan 6 orangresponden dengan nilai maksimum.

### 3.2 Uji Validitas

**Tabel 2**  
**Uji Validitas**

| Variabel | Item             | Koefisien Korelasi | Sig   | Keterangan |
|----------|------------------|--------------------|-------|------------|
|          | X <sub>1.1</sub> | 1.00               | 0.000 | Valid      |
|          | X <sub>1.2</sub> | 0.657              | 0.000 | Valid      |
|          | X <sub>1.3</sub> | 0.555              | 0.000 | Valid      |
|          | X <sub>1.4</sub> | 0.529              | 0.000 | Valid      |

|   |                   |       |       |       |
|---|-------------------|-------|-------|-------|
| Anggaran Berbasis Kinerja                 | X <sub>1.5</sub>  | 0.601 | 0.000 | Valid |
|   | X <sub>1.6</sub>  | 0.530 | 0.000 | Valid |
|   | X <sub>1.7</sub>  | 0.486 | 0.000 | Valid |
|   | X <sub>1.8</sub>  | 0.618 | 0.000 | Valid |
|   | X <sub>1.9</sub>  | 0.661 | 0.000 | Valid |
|   | X <sub>1.10</sub> | 0.704 | 0.000 | Valid |
|   | X <sub>1.11</sub> | 0.639 | 0.000 | Valid |
| Sistem Pelaporan Keuangan                 | X <sub>2.1</sub>  | 1.00  | 0.000 | Valid |
|   | X <sub>2.2</sub>  | 0.756 | 0.000 | Valid |
|   | X <sub>2.3</sub>  | 0.682 | 0.000 | Valid |
|   | X <sub>2.4</sub>  | 0.666 | 0.000 | Valid |
|   | X <sub>2.5</sub>  | 0.738 | 0.000 | Valid |
| Pengendalian Akuntansi                    | X <sub>3.1</sub>  | 1.00  | 0.000 | Valid |
|   | X <sub>3.2</sub>  | 0.704 | 0.000 | Valid |
|   | X <sub>3.3</sub>  | 0.514 | 0.000 | Valid |
|   | X <sub>3.4</sub>  | 0.524 | 0.000 | Valid |
|   | X <sub>3.5</sub>  | 0.409 | 0.000 | Valid |
| Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Y <sub>1.1</sub>  | 1.00  | 0.000 | Valid |
|   | Y <sub>1.2</sub>  | 0.476 | 0.000 | Valid |
|   | Y <sub>1.3</sub>  | 0.602 | 0.000 | Valid |
|   | Y <sub>1.4</sub>  | 0.542 | 0.000 | Valid |
|   | Y <sub>1.5</sub>  | 0.601 | 0.000 | Valid |
|   | Y <sub>1.6</sub>  | 0.648 | 0.000 | Valid |
|   | Y <sub>1.7</sub>  | 0.595 | 0.000 | Valid |
|   | Y <sub>1.8</sub>  | 0.669 | 0.000 | Valid |

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh pernyataan variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1), Sistem Pelaporan Keuangan (X2), Pengendalian Akuntansi (X3), dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dalam penelitian ini dinyatakan valid. hasil  $r_{hitung}$  menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam setiap variabel yang digunakan sebagai instrumen penelitian berada di atas 0.2423. Dengan demikian  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

### 3.3 Uji Reliabilitas

**Tabel 3.3**  
**Uji Reliabilitas**

| Reliability Statistics |                  |                 |
|------------------------|------------------|-----------------|
|                        | Cronbach's Alpha | Keterangan      |
| Anggaran               | 0.944            | <i>Reliable</i> |
| Pelaporan              | 0.926            | <i>Reliable</i> |
| Pengendalian           | 0.878            | <i>Reliable</i> |
| AK_Kinerja             | 0.915            | <i>Reliable</i> |

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas nilai Cronbach Alpha untuk variabel anggaran adalah 0.944 dengan kategori reliabilitas luar biasa, variabel sistem pelaporan keuangan 0,926 dengan kategori reliabilitas luar biasa, pengendalian akuntansi 0.878 dengan kategori reliabilitas tinggi dan akuntabilitas kinerja 0.915 dengan kategori reliabilitas luar biasa.

### 3.4 Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression  
Standardized Residual

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

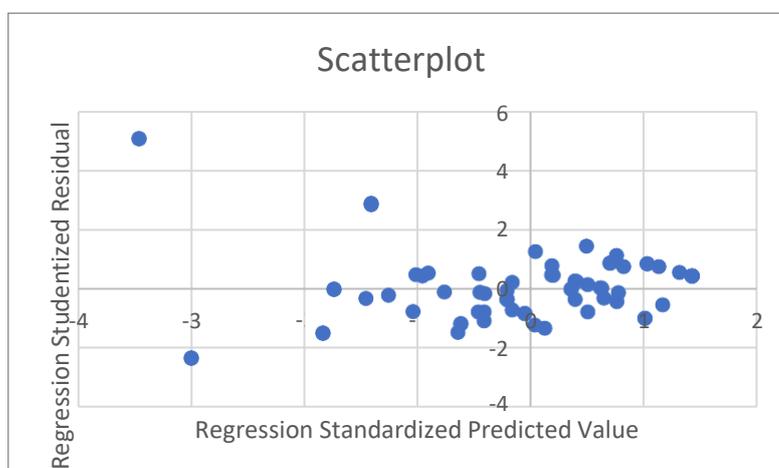
Berdasarkan uji Normalitas dapat dilihat bahwa sebaran titik – titik sangat teratur mengikuti garis diagonal dari titik nol dan tidak melebar jauh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

**3.5 Uji Multikolinieritas**

| Coefficients <sup>a</sup> |              |                             |            |                           |        |       |                         |       |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|-------------------------|-------|
| Model                     |              | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T      | Sig.  | Collinearity Statistics |       |
|                           |              | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       | Tolerance               | VIF   |
| 1                         | (Constant)   | 11.473                      | 2.916      |                           | 3.934  | 0.000 |                         |       |
|                           | Anggaran     | 0.326                       | 0.106      | 0.504                     | 3.063  | 0.003 | 0.296                   | 3.376 |
|                           | Pelaporan    | -0.158                      | 0.211      | -0.143                    | -0.748 | 0.457 | 0.220                   | 4.541 |
|                           | Pengendalian | 0.526                       | 0.184      | 0.412                     | 2.858  | 0.006 | 0.385                   | 2.595 |

Berdasarkan Uji Multikolinieritas dapat diperhatikan bahwa masing - masing variabel memiliki standar error kurang dari satu.  $x_1 = 0.106$ ,  $x_2 = 0.211$  dan  $x_3 = 0.184$ . Serta nilai koefisien beta  $x_1 = 0.326$ ,  $x_2 = -0.158$  dan  $x_3 = 0.526$ . Maka dapat dikatakan bahwa standar *error* rendah dan multikolinieritas tidak terdeteksi.

**3.6 Uji Heterokedastisitas**



Jika perhatikan titik nol pada sumbu X dan Y, titik –titik tidak membentuk pola tertentu melainkan cenderung menumpuk, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

### 3.7 Uji Regresi Berganda

| Coefficients <sup>a</sup> |              |                             |            |                           |        |       |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| Model                     |              | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T      | Sig.  |
|                           |              | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       |
| 1                         | (Constant)   | 11.473                      | 2.916      |                           | 3.934  | 0.000 |
|                           | Anggaran     | 0.326                       | 0.106      | 0.504                     | 3.063  | 0.003 |
|                           | Pelaporan    | -0.158                      | 0.211      | -0.143                    | -0.748 | 0.457 |
|                           | Pengendalian | 0.526                       | 0.184      | 0.412                     | 2.858  | 0.006 |

Berdasarkan tabel di atas didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 11.473 + 0.236 X1 - 0.158 X2 + 0.526X3 + \varepsilon$$

Artinya:

- Jika semua variabel bebas bernilai 0 (nol), maka nilai variabel terikat adalah 11.473
- X1 (Anggaran berbasis kinerja) terhadap Y (Akuntabilitas Kinerja).  
Nilai koefisien X1 adalah 0.326, artinya setiap kenaikan Anggaran berbasis kinerja sebesar satu satuan akan diikuti dengan kenaikan variabel Akuntabilitas Kinerja sebesar 0.326. Dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dalam regresi adalah konstan.
- X2 (sistem pelaporan keuangan) terhadap Y (Akuntabilitas Kinerja).  
Nilai koefisien X2 (sistem Pelaporan Keuangan) adalah -0.158. artinya setiap kenaikan variabel sistem Pelaporan Keuangan sebesar satu satuan akan diikuti oleh penurunan variabel Akuntabilitas Kinerja sebesar 0.158. dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dalam regresi adalah konstan.
- X3 (Pengendalian Akuntansi) terhadap Y (Akuntabilitas Kinerja).  
Nilai koefisien X3 (Pengendalian Akuntansi) adalah 0.526. artinya setiap penurunan nilai variabel pengendalian Akuntansi sebesar satu satuan akan diikuti dengan kenaikan nilai variabel Y Akuntabilitas Kinerja sebesar 0.526, dengan asumsi semua variabel bebas dalam regresi adalah konstan.

### 3.8 Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary <sup>b</sup>                                   |                   |          |                   |                            |               |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model  | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1  | .720 <sup>a</sup> | 0.519    | 0.495             | 3.28279                    | 1.919         |
| a. Predictors: (Constant), Pengendalian, Anggaran, Pelaporan |                   |          |                   |                            |               |
| b. Dependent Variable: AK_Kinerja                            |                   |          |                   |                            |               |

Berdasarkan tabel di atas diperoleh *R Square* sebesar 0.519<sup>a</sup>. Artinya variabel - variabel bebas Anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan dan pengendalian akuntansi berpengaruh sebesar 51,9% terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan sisanya 48,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

### 3.9 Uji Parsial (Uji T)

| Coefficients <sup>a</sup> |              |                             |            |                           |        |       |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| Model                     |              | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  |
|                           |              | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       |
| 1                         | (Constant)   | 11.473                      | 2.916      |                           | 3.934  | 0.000 |
|                           | Anggaran     | 0.326                       | 0.106      | 0.504                     | 3.063  | 0.003 |
|                           | Pelaporan    | -0.158                      | 0.211      | -0.143                    | -0.748 | 0.457 |
|                           | Pengendalian | 0.526                       | 0.184      | 0.412                     | 2.858  | 0.006 |

#### Interpretasi:

1. Anggaran berbasis kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja  
Terlihat pada kolom *Coefficients* variabel X1 terdapat nilai sig. = 0.003 dan  $t_{hitung} = 3.063$  Sehingga nilai sig < alpha (0.05) dan  $|t_{hitung}| > t_{tabel}$  (2.001). Karena  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  dan nilai sig. lebih kecil dari 0.005, maka  $H_a$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.
2. Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja  
Terlihat pada kolom *Coefficients* variabel X2 terdapat nilai sig. = 0.457 dan  $t_{hitung} = - 0.748$ . Sehingga nilai sig < alpha (0.05),  $|t_{hitung}| < t_{tabel}$  (2.001). Karena  $t_{hitung}$  lebih kecil daripada  $t_{tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.
3. Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja  
Terlihat pada kolom *Coefficients* variabel X3 terdapat nilai sig. = 0.006 dan  $t_{hitung} = 2.858$  atau nilai sig < alpha (0.05) dan  $|t_{hitung}| > t_{tabel}$  (2.001). Karena  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  dengan nilai sig. lebih kecil dari 0.005, maka  $H_a$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengendalian akuntansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja.

### 3.10 Uji Simultan

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 697.131        | 3  | 232.377     | 21.563 | .000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 646.603        | 60 | 10.777      |        |                   |
|                    | Total      | 1343.734       | 63 |             |        |                   |

Dari tabel diatas diperoleh nilai sig. 0.000 dan  $F_{hitung} = 21.563$ . Karena nilai sig < alpha (0.05) dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (2,6597) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga secara simultan Anggaran berbasis kinerja, sistem Pelaporan Keuangan dan pengendalian Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

### 3.11 PEMBAHASAN

#### 3.11.1 Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai sig. = 0.003 dan  $t_{hitung} = 3.063$  Sehingga nilai sig < alpha (0.05) dan  $|t_{hitung}| > t_{tabel}$  (2.001) maka  $H_a$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Dengan demikian sistem penganggaran yang berorientasi pada hasil kerja yang makin

diimplementasi dengan sangat benar, maka juga semakin meningkatkan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini, maka makin baiknyapenerapan anggaran di BPMP Provinsi Papua karena dari keberhasilan dalam melaksanakan sistem anggaran terhadap kinerja yang lebih baik sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah. Oleh karena itu sistem anggaran yang berorientasi pada prestasi kerja ini dipercaya menjadi solusi atau alat bagi akuntabilitas kinerja yang diwujudkan melalui beberapa tahapan. Yang mana tahap- tahap unsur anggaran berbasis kinerja ini sangat perlu untuk dimengerti dengan baik dalam setiap perwujudannya oleh seluruh pihak yang terlibat. Beberapa unsur dalam tahapan tersebut meliputi persiapan, ratifikasi, implementasi, pelaporan dan evaluasi anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Silvia, 2021) menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

### **3.11.2 Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai  $\text{sig.} = 0.457$  dan  $t_{hitung} = -0.748$ . Sehingga nilai  $\text{sig} < \alpha (0.05)$ ,  $|t_{hitung}| > t_{tabel} (2.001)$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya sistem pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitaskinerja.

Hasil penelitian ini tidak signifikan kemungkinan disebabkan oleh adanya kondisi di mana pemerintah belum mampu memaksimalkan sistem pelaporan yang tersedia untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik lagi. berdasarkan data penelitian ini, sistem pelaporan BPMP seharusnya menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan demikian hasil penelitian ini membantah hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (Wahdatul et al., 2016). namun relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Hafzhan, 2021) bahwa sistem pelaporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

### **3.11.3 Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai  $\text{sig.} = 0.006$  dan  $t_{hitung} = 2.858$  atau nilai  $\text{sig} < \alpha (0.05)$  dan  $|t_{hitung}| > t_{tabel} (2.001)$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengendalian akuntansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi yang dilaksanakan oleh BPMP Provinsi Papua dinilai baik mulai dari pelaksanaan kegiatan pelaporan keuangan yang disampaikan memiliki hubungan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, semakin baik pengendalian akuntansi maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BPMP Provinsi Papua. Pengendalian akuntansi yang baik menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sistem pelaporan sehingga mampu mengembangkan akuntabilitas kerjanya dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (Wahdatul et al., 2016). Begitu juga dengan hasil penelitian (Anastasia, 2018) yang menunjukkan hasil yang sama, dimana kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **3.11.4 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai  $\text{sig.} = 0.000$  dan  $F_{hitung} = 21.563$ . Karena nilai  $\text{sig} < \alpha (0.05)$  dan  $F_{hitung} > F_{tabel} (2,6597)$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga secara simultan Anggaran berbasis kinerja, sistem Pelaporan Keuangan dan pengendalian Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. dengan adanya anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan dan pengendalian akuntansi yang

jelas dapat meningkatkan kinerja pegawai khususnya pada pengelolaan keuangan pemerintah untuk mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Silvia, 2021) dan (Muhammad Hafzhan, 2021) bahwa secara simultan variabel anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan dan pengendalian akuntansi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan sistem pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Kemudian dari hasil uji simultan diperoleh hasil ketiga variabel independen yaitu anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Agusti, R., & Riani, I. (2015). Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 34060.
- Anastasia, D. R. (2018). *pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)*.
- Andi Supangat. (2008). *Statistik dalam Kajian Deskriptif, Infensi dan Paramatik*. Kencana Prenada.
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 13(1), 15–27.
- Anthony. (2005). *Sistem Pengendalian Manajemen (II)*. Salemba Empat.
- Bastian. (2006). *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Salemba Empat, 2006.
- Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (ketiga)*. Erlangga.
- BPKP. (2005). *Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP- 911/K/JF/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pengawasan*. 1–41.
- BPKP. (2011). *Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1392/K/SU/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sekretariat Utama BPKP*.
- Danan Biwiroto. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Surakarta (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta). *Skripsi*.
- Devika Diah. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429–444. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.85>
- Eko Setiawan. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di SKPD Pelalawan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 33, 1–14.
- Eny Kusri. (2020). *pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kesulitan tujuan anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus)*.

- Fathia, N. (2017). pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan kinerja dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD di Prov. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 670–684.
- Ghozali. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (4th ed.). Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. In *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Halim. (2004). *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah* (4th ed.).
- Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Kusufi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Herry. (2009). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Bumi Aksara.
- Husein Umar. (2003). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka.
- Indraswari, K. (2010). *pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi jawa tengah*.
- Jensen and Meckling. (1976). theory of firm: manajerial behavior, agency costs and ownership structure. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Laporan Kinerja LPMP Papua. (2019). Laporan Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor, 53*, 1689–1699. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2012.02.007>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta : Andi, 2002.
- Miriam Budiardjo. (1994). *Demokrasi di Indonesia demokrasi parlementer dan demokrasi Pancasila*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , 1994.
- Muhammad Hafzhan. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan*. 6.
- Mukhofifah, U., Migunani, & Hidayat, A. (2016). Perancangan Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis Web. *IJSE-Indonesian Journal On Software Engineering*, 2(1), 16.
- Nanda, R., & Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 327–340.
- Netty. (2011). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. [https://www.academia.edu/download/50159009/Netty\\_Herawaty.pdf](https://www.academia.edu/download/50159009/Netty_Herawaty.pdf)
- Rencana Strategis LPMP Papua. (2020). *Laporan Kinerja Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan*.
- Riawan Tjandra. (2009). *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo.
- Riwandani, A. (n.d.). *pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (Studi Kasus Pada BPKD – Kabupaten Bandung Barat)*. 1–16.
- Rona Efrizar. (2017). pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporan terhadap kinerja manajerial (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1726– 1740.
- Sekaran. (2006). *Metode Penelitian Bisnis* (4th ed.). Salemba Empat.
- Selviani, D. (2021). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi. *Land Journal*, 1(2), 117–124.

---

<https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i2.703>

Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian*. Alfabeta.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sulistio, E. B. (2010). Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah. *Sosialita*, 1(1), 1–13. <http://jurnal.uabl.ac.id/index.php/JIA/article/view/353/352>

Sulkarnaim S. (2016). *Pengaruh Komitmen Organisasi, Penyempurnaan Sistem Administrasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Reward Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Kabupaten Kepulauan Selayar*.

Urip Santoso. (2008). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud*. 20.

Wahdatul, L., Rahayu, S., Dillak, V. J., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Telkom, U. (2016).

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung the Influence of Performance – Based Budgeting and Financial Reporting System To the Accountability of the Local Governme. *E-Proceeding of Management*, 3(2), 1560–1565.

Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. *Bisnis Dan Akuntansi Unsurnya*, 6(1), 47–56.

Yushita. (2010). *earning management dalam hubungan keagenan*. VIII(2005), 1–12.